



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	15
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III	24
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	36
3.3. Program dan Kegiatan	37
BAB IV	43
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	43
BAB V	50
PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang

berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan dalam Administrasi Kependudukan”.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan
Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan OPD
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
 - k. Pembahasan forum OPD
3. Penyusunan rancangan
Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat

- Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023)

Nama Perangkat Daerah : Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
2 12	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	100%	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	100%
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	24 jenis	4 jenis	0	0	0%	3 Unit	3 Unit	100%
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	48 laporan	48 laporan	48 laporan	100%	48 Laporan	48 Laporan	100%
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%

2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100%	17 Unit	17 Unit	100%
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	98%	99,99%	98%	98%	100,00%	100%	100%	100%
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	98%	99,99%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
2	12	02	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	4.500 dokumen	4.500 dokumen	4.500 dokumen	4.500 dokumen	100%	4500 Dokumen	4500 Dokumen	100%
						Jumlah arsip yang didokumentasikan	5.500 Arsip	4.681 Arsip	5.500 Arsip	4.681 Arsip	85%			100%
2	12	02	2.01	05	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	16.500 dokumen	121.828 dokumen	16.500 dokumen	121.828 dokumen	738,35%			100%
						Jumlah dokumen adminduk online yang diterbitkan	30.000 dokumen	11.594 dokumen	30.000 dokumen	11.594 dokumen	38,65%			100%
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	98%	99,99%	98%	100%	102,04%	100%	100%	100%
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase layanan terhadap penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	98%	99,99%	98%	100%	102,04%	100%	100%	100%
2	12	03	2.01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil	6.600 akta	8.231 akta	6.600 akta	8.231 akta	125%	13 Laporan	13 Laporan	100%
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Dokumen Kependudukan	54 kali		2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	100%	100%
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Jumlah elemen data yang di kumpulkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	12	04	2.01	01	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah validasi elemen data golongan darah								
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100%	100%	100%	Sangat Inovatif (> 1000)	100%	100%	100%	100%
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	24 OPD		12 Laporan	12 Laporan	100%
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan								
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat						5 Dokumen	5 Dokumen	100%
						Jumlah media yang dipublikasikan								
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase keakuratan data						100,00%	100,00%	100,00%
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil/ agregat kependudukan yang tersaji						100%	100%	100%
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota						3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi target 100 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% persentasenya 100%, program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk target kinerja tahun 2023 sebesar 98 % dengan capaian 98% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 1 Kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
3. Program Pencatatan Sipil dengan indikator Program Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dengan target tahun 2023 sebesar 98% dengan capaian 98% .
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Jumlah Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Dokumen Kependudukan target tahun 2023 sebanyak 2 dokumen dengan capaian 2 dokumen dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator persentase keakuratan data target tahun 2023 sebesar 99,98% dengan capaian 99,98% dengan persentase capaian 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

Nama Perangkat Daerah : Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi			Target program dan kegiatan Renja Tahun	Perkiraan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11
2 12	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%					100,00%	100,00%	100%
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%					100 Persen	100 Persen	100%
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	63 Orang/bulan					21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	100%
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%					100%	100%	100%
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket					10 paket	10 paket	100%
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket					2 paket	2 paket	100%
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket					2 paket	2 paket	100%
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan					20 laporan	20 laporan	100%
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Paket					100%	100%	100%
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	24 jenis					4 paket	4 paket	0%
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%					100%	100%	100%
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan					48 laporan	48 laporan	100%
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan					6 Laporan	6 Laporan	100%

2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	12 Unit					100	100	100%
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit					9 unit	9 unit	100%
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	17 unit					17 unit	17 unit	100%
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit					1 unit	1 unit	100%
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk						100%	100%	100%
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk						100%	100%	100%
2	12	02	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk						4500 Dokumen	4500 Dokumen	100%
						Jumlah arsip yang didokumentasikan								
2	12	02	2.01	05	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan						13 Laporan	13 Laporan	100%
						Jumlah dokumen adminduk online yang diterbitkan								
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil						100%	100%	100%
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase layanan terhadap penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil						100%	100%	100%
2	12	03	2.01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil						2000 Layanan	2000 Layanan	100%
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Dokumen Kependudukan						100	100	100
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Jumlah elemen data yang di kumpulkan						100	100	100
2	12	04	2.01	01	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah validasi elemen data golongan darah								
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah						100%	100%	100%
2	12	04	2.03	03	Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						12 Laporan	12 Laporan	100%
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan								
2	12	04	2.03	07										
					Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat						5 Dokumen	5 Dokumen	100%
						Jumlah media yang dipublikasikan								
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase keakuratan data						100%	100%	100%
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil/ agregat kependudukan yang tersaji						100%	100%	100%
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota						3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% dan sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu :

- a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (73,57%). Biaya fotocopy cukup banyak bersisa, hal karena kita pemanfaatan aplikasi e-office dan srikandi yang meminimalkan pemanfaatan kertas, dan biaya cetak dan jilid sesuai kebutuhan karena sebagian besar dokumen tersedia dalam bentuk softcopy.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (36,78%). Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan personal komputer/Notebook, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan kerusakan serta selisih harga pasaran dengan harga yang tersedia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran “meningkatnya pelayanan publik bidang administrasi kependudukan yang berkualitas dan melayani” dengan indikator kinerja sasaran yakni, “indeks kepuasan masyarakat dengan target sebesar 90.22%. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89	90,50	90,50	81-100	81-100	81-100	81-100	98,75	89,62	95,84	97,11	98,75	98,42	100	100	109	110,3	
2	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100% thn 2018			100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	100	100	100	100	
3	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk				95%	95%	100	100		99,04	99,95	100	100	100,00	104,2	105,2	100	100	
4	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	90% thn 2018			95%	95%	99,90	99,95		99,14	99,93	99,98	99,99		104,4	105,2	100	100	
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK				Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	100	100	100	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				88-100	88-100	89,07	89,52	98,75	89,62	95,84	97,11	98,75	98,42	100	100	109	110,3	
7	Rasio Bayi Berakta Kelahiran				95%	95%	92	96		97,01	98,81	99,98	99,99		102,1	104	108	104	
8	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	80% thn 2018			95%	95%	100%	100%		97,01	98,81	99,98	99,99		102,1	104	99,98	99,99	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu
 - a. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan nilai 98.42 dengan persentase capaian 109.33%.
2. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan melayani, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja”. Pada tahun 2023 adalah sebesar 98.42%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 capaian ini mengalami penurunan namun bukan berarti menurunnya kualitas pelayanan karena masih di atas angka 95 yang masih dalam kategori Sangat Memuaskan/Baik Sekali.
 - b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien”. dengan indikator lama waktu pelayanan dokumen administrasi kependudukan. Pada tahun 2023, realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%’

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerinatahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disadari bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun Penyelenggaraan Urusan Pemerinatahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi aspek fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan

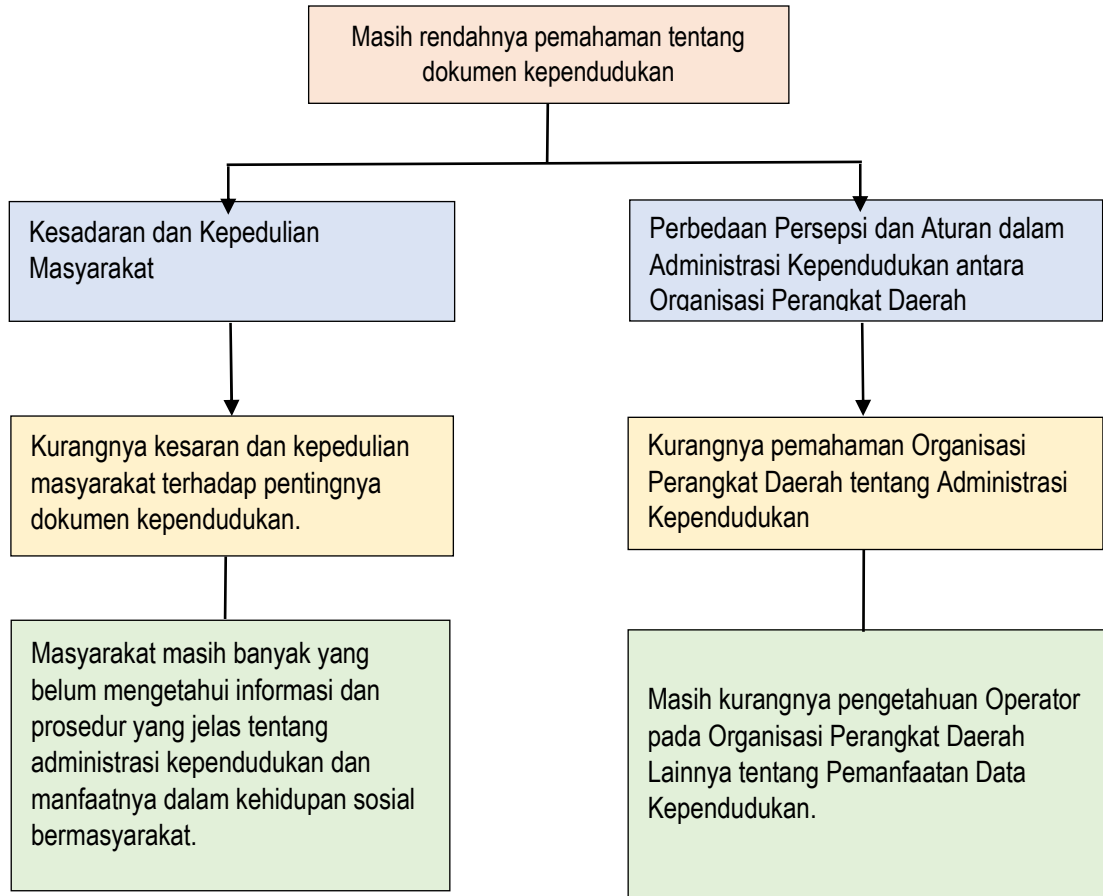
administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.	Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi dan prosedur yang jelas tentang administrasi kependudukan dan manfaatnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat.	
2.	Perbedaan Persepsi dan Aturan dalam Administrasi Kependudukan antara Organisasi Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah tentang Administrasi Kependudukan	Masih kurangnya pengetahuan Operator pada Organisasi Perangkat Daerah Lainnya tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.	

Gambar 2.1
POHON MASALAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota

Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.5
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. Rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. Penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	a. Layanan infrastruktur dasar b. Kesesuaian pemanfaatan ruang c. Kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara massif.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara massif.

- c. Belum optimalnya peran Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- d. Masih lemahnya regulasi dan peningkatan kompetensi Aparatur Dukcapil yang menguasai talenta, budaya dan literasi digital.
- e. Anggaran APBD yang sangat terbatas, sedangkan dukungan APBN untuk layanan Adminduk di provinsi maupun kabupaten tidak ada lagi.
- f. Lokasi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak strategis, berada diujung bagian barat kota sehingga menyulitkan masyarakat yang berada di Padang Panjang Timur, serta fasilitas yang ada saat ini tidak cukup representatif karena belum memenuhi standar prasarana pelayanan publik seperti parkir, musholla, ruang pelayanan representatif, area bermain anak, ruang laktasi, toilet disabilitas, toilet pengunjung, smoking area. Selain itu posisi kantor yang berada di tikungan jalan lintas provinsi sangat rawan kecelakaan lalu lintas.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuaikan dengan PI)					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.980.096.723				4.243.575.676	263.478.953	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	2.976.343.023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	3.384.666.714	408.323.691	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.294.383.523	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.578.761.374	284.377.851	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	2.294.383.523	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	2.578.761.374	284.377.851	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 %	-	-	
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	161.515.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	220.102.400	58.586.500	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.554.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.523.100	(30.900)	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.524.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.686.300	8.162.300	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	27.987.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.998.000	(17.989.900)	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	110.450.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	178.895.000	68.445.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	20.000.000	-	
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	-	
X.XX.01.2.07.0005	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	260.089.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	245.712.940	(14.376.660)	
X.XX.01.2.07.0006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	95.456.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	54.333.740	(41.122.260)	

X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	164.633.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.379.200	26.745.600	
X.XX.01.2.08.0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	240.354.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	320.090.000	79.736.000	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	120.354.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	243.030.000	122.676.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	27.060.000	(32.940.000)	
X.XX.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	(10.000.000)	
X.XX.01.2.09.0006	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Padang Panjang	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	638.358.100	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Padang Panjang	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	494.541.912	(143.816.188)	
5.01.02	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	99 %	172.101.100	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	99 %	59.259.000	(112.842.100)	
5.01.02.2.01.0002	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	161.751.100	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	48.907.000	(112.844.100)	
5.01.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen	10.350.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen	10.352.000	2.000	
5.01.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen	-	-	
5.01.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100 %	365.690.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100 %	267.375.912	(98.314.088)	
5.01.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	120.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	72.722.000	(47.278.000)	
5.01.02.2.03	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	245.690.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	194.653.912	(51.036.088)	
5.01.02.2.03.0003	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	100.567.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	167.907.000	67.340.000	
5.01.02.2.04	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	100.567.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	167.907.000	67.340.000	
5.01.02.2.04.0001	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Padang Panjang	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100 %	139.688.100	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Padang Panjang	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100 %	139.668.050	(20.050)	(20.050)

5.01.03	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2000 akta	139.688.100	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2000 akta	139.668.050	(20.050)	
5.01.03.2.0 1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	139.688.100	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	139.668.050	(20.050)	
5.01.03.2.0 1.0008	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Padang Panjang	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	200.707.500	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Padang Panjang	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	199.723.000	(984.500)	
5.01.03.2.0 2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	163.960.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	162.975.600	(984.400)	
5.01.03.2.0 2.0008	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	32.000.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	32.000.000	-	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	20.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	19.960.000	(40.000)	
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	20.000.000	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	20.027.600	27.600	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Dokumen	91.960.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Dokumen	90.988.000	(972.000)	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	36.747.500	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	36.747.400	(100)	
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	36.747.500	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	36.747.400	(100)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	24.976.000	(24.000)	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 dokumen	25.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 dokumen		(25.000.000)	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	25.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	24.976.000	(24.000)	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam proses meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti dokumen kependudukan dan juga tentang capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan melakukan Sosialisasi di Kelurahan dan Kecamatan yang diikuti oleh Ketua RW masing-masing Kelurahan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, masyarakat sudah mulai memahami tentang pentingnya dokumen kependudukan dan capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) 9,8% dari target nasional 30%. Untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang menduduki peringkat teratas untuk capaian IKD.

Pada Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025						
Kota Padang Panjang						
No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian targettarget sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian targettarget pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya Prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah Kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73
		1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	56,42	57,62	58,82	60,02	60,02
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,00
6		Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektorPerdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44	
			LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74	
			LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43	
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)	Aman (89,09)	Aman (91,78)	Aman (91,78)
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
		Ketentraman dan Ketertiban Umum								
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
5	Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76	91,76
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,61	66,80	67-68	66,76	69-70	69-70
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,0

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD yaitu tujuan 2 (dua). yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel”**, Indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator yang akan dicapai: Nilai penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek perencanaan dan aspek penelitian dan pengembangan, dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

3.1.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024. Adapun Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

“ Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan

Pemerintahan Dalam Negeri ”

Sedangkan Misi dari Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

- a. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan, Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi serta Karakter Bangsa dan Stabilitas politik dalam negeri.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
- c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Untuk visi misi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melekat pada visi misi Kementerian Dalam Negeri.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah :

- a) Rencana struktur tata ruang
- b) Struktur tata ruang saat ini
- c) Rencana pola ruang
- d) Pola ruang saat ini dan
- e) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Untuk menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat hasil telaahannya seperti pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.1

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Padang Panjang

No	Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Ruang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mengacu kepada RTRW sesuai dengan struktur dan pola ruang yang diharapkan. Untuk itu diperlukan perencanaan, kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan.

Tabel 3.2

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Padang Panjang

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana struktur Ruang Terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
----	-----------------------	------------------------	---	--	---

Berdasarkan struktur ruang diperlukan perencanaan, program kegiatan yang mengacu kepada pola ruang dan struktur ruang sehingga pelayanan di OPD meningkat sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

b. Telaahan Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b) Perkiraan mengenai dampak dari resiko lingkungan hidup
- c) Kinerja layanan/jasa ekosistem
- d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah melampaui, maka :

- 1) Kebijakan rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- 2) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS sebagaimana pada Tabel 3.3 ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.3

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Perangkat
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk	—	Secara langsung tidak berpengaruh pada pelayanan Perangkat Daerah	—
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	—		
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	—		
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	—		
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap	—		

6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	—		
----	---	---	--	--

1. Telaahan Renstra BRIN

Pada saat ini belum ditetapkan Renstra 2025-2029, oleh sebab itu sementara kita mengacu pada Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024. Dalam rangka menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, BRIN menetapkan visi sebagai **“Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA,
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA,
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

Berdasarkan pada Visi dan misi BRIN seperti yang dikemukakan di atas, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan bersifat operasional dimana berupa perumusan Sasaran Strategis sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

- 1) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan;
- 3) Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim;
- 4) Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN;
- 5) Implementasi Reformasi Birokrasi BRIN sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.;

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan dalam Administrasi Kependudukan		Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	90	93	95
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	92	94	95

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pendaftaran Penduduk
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2) Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

- b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, FOrmulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan.
 - 2) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
 - 3. Program Pencatatan Sipil
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Pencatatan Sipil
 - 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - 3) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - 1) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Bimbingan Teknis terkait Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
 - 5. Program Pengelola Profil Kependudukan
 - a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
 - 1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									4.455.754.447
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.243.575.664					4.455.754.447
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang pada Perangkat Daerah		100 %	3.389.789.214			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100 %	3.559.278.675
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2.578.761.374			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.707.699.443
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294 Orang/bulan	2.578.761.374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	2.707.699.443
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0 %	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 %	0
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	220.467.200			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	231.490.560
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	3.523.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.699.255
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	28.049.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.452.185
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	9.999.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.499.370
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	178.895.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	187.839.750

2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 %	24.757.700			Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	25.995.585
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	24.757.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.995.585
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 %	245.712.940			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	257.998.587
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	54.333.740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	57.050.427
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	191.379.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.948.160
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik		100 %	320.090.000			Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	100 %	336.094.500
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	243.030.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	255.181.500
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	27.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	28.413.000
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	52.500.000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan		100 %	489.419.400			Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	513.890.370
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Terlayani Terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk		99 %	54.744.000			Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	99 %	57.481.200
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	44.392.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	46.611.600
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		4500 Dokumen	10.352.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4500 Dokumen	10.869.600
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0

2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana		100 %	194.046.400			Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100 %	203.748.720
					Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun		1 Dokumen	72.722.000				1 Dokumen	76.358.100
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10000 Dokumen	194.046.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	203.748.720
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		1 Jenis	167.907.000			Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	176.302.350
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	167.907.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	176.302.350
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun		100 %	139.668.050			Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100 %	146.651.453
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun		2000 akta	139.668.050			Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2000 akta	146.651.453
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2000 Layanan	139.668.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	146.651.453
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100 %	199.723.000			Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	209.709.150
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaran Informasi Administrasi Kependudukan		12 Laporan	162.975.600			Jumlah laporan penyelenggaran informasi administrasi kependudukan	12 laporan	171.124.380
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	32.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	33.600.000
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	19.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	20.958.000
					Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 Laporan	20.027.600				1 laporan	21.028.980
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	90.988.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Dokumen	95.537.400
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		1 Laporan	36.747.400			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	1 laporan	38.584.770
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	36.747.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	38.584.770

2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan		3 Dokumen	24.976.000			Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	26.224.800
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan		3 Dokumen	24.976.000			Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 dokumen	26.224.800
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	24.976.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	26.224.800

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran pembangunan daerah. Namun secara khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Nilai penyelenggaraan pelayanan publik”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					PI dari Bappeda				4,243,575,676	-				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,243,575,676					4,455,754,460
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.1.2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,243,575,676					4,455,754,460
2.1.2.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang pada Perangkat Daerah		100 %	3,389,789,226			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100 %	3,559,278,687
2.1.2.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2,578,761,374			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2,707,699,443
2.1.2.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294 Orang/bulan	2,578,761,374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	2,707,699,443
2.1.2.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0 %	0			Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 %	0
2.1.2.01.2.05.0002					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
2.1.2.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	220,102,400			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	231,107,520
2.1.2.01.2.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	3,523,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,699,255
2.1.2.01.2.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	27,686,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	29,070,615

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
212012.060005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	9,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,497,900
212012.060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	178,895,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	187,839,750
212012.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan		100 %	25,122,512			Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan	100 %	26,378,638
212012.2.070006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	25,122,512	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	26,378,638
212012.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 %	245,712,940			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	257,998,587
212012.2.080002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	54,333,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	57,050,427
212012.2.080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	191,379,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200,948,160
212012.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik		100 %	320,090,000			Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	336,094,500
212012.2.090001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	243,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	255,181,500
212012.2.090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	27,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	28,413,000
212012.2.090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	52,500,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	2	0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan		100 %	489,419,400			Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	513,890,370
21	2	0	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Terlayani Terhadap Dokumen Pendaftaran		99 %	54,744,000			Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran	99 %	57,481,200
21	2	0	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	44,392,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	46,611,600
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		4500 Dokumen	10,352,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	4500 Dokumen	10,869,600
21	2	0	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0
21	2	0	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana		100 %	194,046,400			Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100 %	203,748,720
					Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia		1 Dokumen	72,722,000				1 Dokumen	76,358,100
21	2	0	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10000 Dokumen	194,046,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	203,748,720
21	2	0	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		1 Jenis	167,907,000			Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	176,302,350
21	2	0	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	167,907,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	176,302,350

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21.02.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun		100 %	139,668,050			Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100 %	146,651,453
21.02.3	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun		2000 akta	139,668,050			Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2000 akta	146,651,453
21.02.3	2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2000 Layanan	139,668,050.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	146,651,453
21.02.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100 %	199,723,000			Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	209,709,150
21.02.4	2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Laporan	162,975,600			Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	171,124,380
21.02.4	2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	32,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	33,600,000
21.02.4	2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	19,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	20,958,000
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 Laporan	20,027,600				1 laporan	21,028,980
21.02.4	2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	90,988,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Dokumen	95,537,400
21.02.4	2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		1 Laporan	36,747,400			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	1 laporan	38,584,770

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21202040003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	36,747,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	38,584,770
2120205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan		3 Dokumen	24,976,000			Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	26,224,800
2120205	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan		3 Dokumen	24,976,000			Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 dokumen	26,224,800
21202050001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	3 Dokumen	24,976,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	26,224,800

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juli 2024

**Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang**

Rudy Suarman, AP
Pembina Utama Muda NIP. 19740918 199311 1 001